

Penerapan Demokrasi dan Penegakan HAM di Nepal

serta Kontribusi Bantuan Finlandia

Oleh : Aliya Hamida (5191611025)

Nepal merupakan salah satu negara miskin dalam lingkup Asia maupun dunia. Kemiskinan di Nepal merupakan wujud nyata akibat dari kebijakan politik maupun ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lebih tepatnya kerajaan yang monarki. Sistem pemerintahan ini tentu membuat Nepal tertutup terhadap dunia luar, dalam artian hanya menggantungkan kebutuhan ekonomi negaranya terhadap sektor pertanian dalam negara tersebut. Namun sektor pertanian di Nepal tidak sebesar itu untuk kemudian dapat dijadikan sumber utama dalam memenuhi kehidupan ekonomi negaranya. Hal ini disebabkan oleh sempitnya lahan di Nepal itu sendiri yang diperburuk oleh keterbatasan fasilitas serta teknologi modern yang pada dasarnya menjadi penopang sektor pertanian.

Sistem politik yang menutup diri ini, atau biasa disebut sebagai politik isolasionis turut memperburuk keadaan sosial masyarakat di Nepal, dimana hingga tahun 1950 Nepal tidak memiliki fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan kompleks industri. Hal ini menjadi tekanan tersendiri hingga pada puncaknya membuat Nepal mulai membuka diri dan turut dalam aktivitas perekonomian dunia di tahun 1991. Selain itu, apabila disoroti dalam perihal penegakan HAM di dalam masyarakatnya, Nepal masih amat sangat kental dengan budaya diskriminasi kasta dan kesenjangan sosial. Sebagai gambaran, sekitar 35% penduduk Nepal berasal dari kasta Dalit, kasta yang dianggap sebagai kasta terendah, layaknya kasta Sudra dan Paria di India. Kasta Dalit dalam tatanan masyarakat penduduk Nepal hanya diperbolehkan menjadi pekerja kasar, seperti pandai besi, penjahit, tukang semir sepatu, dsb. Faktor Geografis turut berperan dalam keterbelakangan di Nepal karena konstruksinya yang bergunung gunung sehingga banyak pelosok yang tak dapat diakses oleh pembangunan fasilitas dan penghubung darat seperti jalan raya. Penduduk wilayah tersebut kemudian dipaksa hidup mandiri dalam kondisi serba terbatas. Wilayah inilah yang menjadi basis pemberontakan pada perang saudara yang terjadi di Nepal sejak tahun 1996 - 2006.

Apabila ditelisik dari faktor politiknya, Nepal yang berdiri sejak abad 18 menganut sistem monarki absolut. Namun memasuki abad 20 seiring dengan banyaknya penduduk yang menimba ilmu ke luar negeri, menjadikan jumlah akademisi atau kaum terpelajar

menjadi banyak, hingga kemudian menyebabkan merebaknya tuntutan untuk merubah sistem pemerintahan menjadi monarki parlementer. Harapannya dengan adanya parlemen, maka hadir perwakilan dari rakyat berbagai kalangan yang bisa memperjuangkan kepentingannya. Narasi ini juga muncul di kalangan masyarakat kelas bawah, sebagai tuntutan atas hak hak mereka yang selama ini diabaikan. Mulanya ini ditolak keras oleh kerajaan, namun di tahun 1959 seiring dengan pergantian kepemimpinan, kerajaan menyelenggarakan pemilu pertama kalinya untuk menentukan parlemen. Sayangnya, parlemen hanya bertahan sekejap, pada tahun 1962 parlemen dibubarkan pasca munculnya gesekan antara pihak kerajaan dan parlemen. Lagi lagi, Nepal dipimpin oleh raja absolut. Namun, parlemen yang bubar tidak berhasil membubarkan partai partai yang ada. Partai politik yang bertahan melakukan berbagai gerakan diam diam dan terang terang seperti demonstrasi hingga berhasil membuat kerajaan menyelenggarakan pemilu kedua di tahun 1991. Namun setahun kemudian terjadi krisis ekonomi yang menimbulkan efek domino kerusuhan dan demonstrasi yang merajalela hingga kerajaan memilih kebijakan yang menimbulkan banyaknya korban jiwa yang ujungnya pecah peperangan antara pro pemerintah dan pemberontak atau kontra pemerintah. Kelompok kontra pemerintah termasuk parlemen mencari dan mendapatkan dukungan dari pihak pihak luar hingga berhasil membubarkan kerajaan di tahun 2008.

Salah satu pihak yang kemudian membantu kontra pemerintah ialah Finlandia dengan program bantuannya. Dimana mereka mengucurkan dana untuk gerakan masyarakat yang menyuarakan paham demokrasi dan penegakan HAM. Selain itu mereka juga aktif memberi edukasi masyarakat misal dengan sosialisasi yang intinya mentransfer pemahaman terkait demokrasi dan penegakan HAM terhadap kalangan masyarakat.

Pada akhirnya, di tahun 2008 untuk pertama kalinya setelah perang saudara yang berkepanjangan, Nepal menyelenggarakan pemilu parlemen yang kemudian menghasilkan Ram Baran Yadav sebagai presiden pertama dan Pushpa Kamal Dahal sebagai perdana menteri Nepal. Pemilu ini sekaligus menjadi momen transisi Nepal menjadi negara federal karena penyelenggaraan pemilu ini juga menjadi momen penegakan HAM dimana berhasil mengikis kesenjangan sosial antar kasta dan penduduk kota maupun desa yang terletak di perbukitan karena mereka diberi hak suara yang sama. Bahkan, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dijamin dengan tim keamanan untuk sampai ke tempat pemungutan suara atau biasa disingkat TPS. Selain itu, calon yang dapat maju untuk berpartisipasi dalam parlemen sama sekali tidak dibedakan berdasar kasta ataupun ekonominya, hanya disyaratkan sebagai anggota partai politik sebagaimana aturan yang telah berlaku.